

ABSTRAK

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek akses dan keberlanjutan layanan pendidikan formal. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan merupakan kewajiban konstitusional negara yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab semua pihak, salah satunya Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Jember, komitmen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak yang mewajibkan fasilitasi pendidikan bagi anak putus sekolah melalui Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan sebagai bagian dari hak asasi anak yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan daerah, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Layak Anak merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus yang merupakan pendidikan formal yang fleksibel, tidak berbiaya, dan relevan untuk menjangkau anak jalanan serta anak putus sekolah sebagaimana diatur dalam. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa secara normatif pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan, tetapi diperlukan penguatan pelaksanaan kebijakan, peningkatan sinergi lembaga, dan pengawasan berkelanjutan agar hak pendidikan anak jalanan dapat terpenuhi secara efektif, merata, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hak Pendidikan; Anak Jalanan; Sekolah Terbuka; Kabupaten Layak Anak; Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

Fulfilling the right to education for street children still faces various obstacles, particularly in terms of access to and sustainability of formal education services. Fulfilling the right to education for street children is a constitutional obligation of the state, the implementation of which is the responsibility of all parties, one of which is the Regional Government. In Jember Regency, this commitment is realized through the Regional Regulation on Child-Friendly Districts, which requires educational facilities for dropouts through Open Schools or Learning Activity Centers. This study aims to analyze the form of responsibility of the Jember Regency Regional Government in fulfilling the right to education for street children as part of children's human rights guaranteed by the constitution and laws and regulations. The research method used is normative juridical legal research with a statutory and conceptual approach. The legal materials used include primary legal materials in the form of laws and regional regulations, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant legal literature. The results of this study indicate that the Open School referred to in the Child-Friendly Regency Regional Regulation refers to the Regulation of the Minister of Education and Culture concerning the Provision of Special Service Education, which is a flexible, free, and relevant formal education to reach street children and dropouts, as stipulated in the Regulation. The conclusion of this study confirms that normatively, local governments have a clear legal basis and authority to fulfill street children's right to education. However, strengthening policy implementation, increasing institutional synergy, and ongoing supervision are needed to ensure that street children's right to education can be fulfilled effectively, equitably, and fairly.

Keywords: Right to Education; Street Children; Open School; Child-Friendly Regency; Local Government.